

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Guritno, B. (1992). *Dasar-dasar Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniawan, H. (2016). *Sistem Informasi Perpajakan Daerah Berbasis Digital*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nurmala, N., & Kosasih, E. (2021). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 8(2), 55–64.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, M. (2015). *Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 3(1), 25–33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.